

LAPORAN PENELITIAN



**ORIENTASI POLITIK
PEREMPUAN ETNIS CINA (TIONGHOA) KOTA
PADANG
TERHADAP KEPOLITIKAN PASCA ORDE BARU**

Oleh :

**Dra. Al Rafni, M.Si.
Drs. Suryanef, M.Si.
Estika Sari, S.H.**

**DIBIYAI OLEH
DANA DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN ANGGARAN 2008
SURAT PERJANJIAN KONTRAK NOMOR : 1244/H35/KU/DIPA/2008
TANGGAL 2 JUNI 2008**

**FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL/JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

NOPEMBER 2008

women - cina ki

TANGGAL	9-12-08
OLAH	HR
KOLEKSI	K1
NO. INVENTARIS	231/Htl/2008-061
INSTRUKSI	323.340.899.511 ALR 0.1

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa)
Kota Padang Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru.
2. Bidang Ilmu : Ilmu Politik.
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dra. Al Rafni, M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan.
 - c. NIP : 132 056 198.
 - d. Pangkat/Golongan : Pembina/IV a.
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala.
 - f. Fakultas/Jurusan : Ilmu-ilmu Sosial/Ilmu Sosial Politik.
4. Jumlah Tim Peneliti : 3 orang.
Nama Anggota Peneliti I : Drs. Suryanef, M.Si.
Nama Anggota Peneliti II : Estika Sari, S.H.
5. Lokasi Penelitian : Kel. Kampung Podok, Kec. Pdg. Barat, Kota Padang.
6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan.
- a. Nama instansi : ---
 - b. Alamat : ---
7. Waktu penelitian : 7 bulan.
8. Biaya : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).


Padang, 28 Nopember 2008

Mengetahui,
Dekan FLS - Univ. Negeri Padang,

Drs. Suryanef, M.Si.
NIP. 131 945 223
S. Kuasa, No.2178/H35.1.6/TU/2008
Tanggal 20 Nopember 2008

Ketua Peneliti

Dra. Al Rafni, M.Si.
NIP. 132 056 198

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang,

Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.
NIP. 130 365 634.

PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

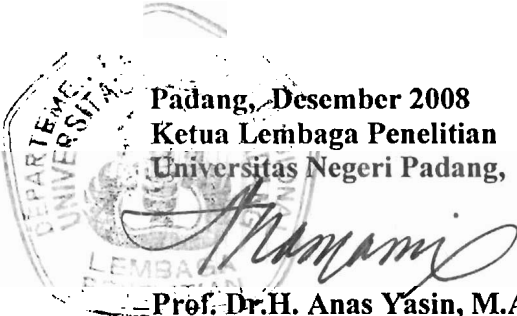
Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang *Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Kota Padang terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru*, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 1244/H35/KU/DIPA/2008 Tanggal 2 Juni 2008.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.


Padang, Desember 2008
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,
Prof. Dr.H. Anas Yasin, M.A.
NIP. 130365634

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Orientasi Politik	6
B. Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Dalam Kehidupan Politik Indonesia	13
C. Kerangka Berpikir	19
BAB III : METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Responden Penelitian	20
C. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	21
D. Teknik Pengujian Keabsahan Data	22
E. Teknik Analisis Data	22
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Temuan Umum	25
B. Temuan Khusus dan Pembahasan	29
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	28
Tabel 2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Agama	28
Tabel 3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	28
Tabel 4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
Tabel 5 : Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kebijakan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Kognitif	31
Tabel 6 : Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kebijakan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Afektif	37
Tabel 7 : Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kebijakan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Evaluatif	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Curriculum Vitae Peneliti.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah :

Transisi menuju demokrasi di Indonesia akhirnya meniupkan angin segar dan sekaligus membuka peluang bagi aktifis perempuan untuk memperjuangkan keadilan gender dalam bidang politik. Selama ini di belahan dunia mana pun, baik di negara-negara demokrasi yang mapan maupun di negara-negara yang baru belajar demokrasi, perempuan selalu menjadi warga negara kelas dua. Contohnya dalam hal keterlibatan di dunia politik. Fakta mengungkapkan bahwa di lembaga legislatif perempuan tidak terwakili secara proporsional. Pemilu pada masa Orde Baru yang terselenggara sebanyak delapan kali, perempuan hanya terwakili tidak lebih dari 12%. Sementara itu di era reformasi, pemilu 1999 keterwakilan perempuan di legislatif merosot menjadi 9%, sedangkan pemilu 2004 perempuan hanya terwakili sekitar 11%. Jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Demikian pula dengan DPRD, di Provinsi Sumbar, dari 605 kursi anggota dewan, hanya 46 diantaranya yang diduduki perempuan (KPUD Sumbar, 2004). Di jajaran eksekutif setingkat menteri, dalam sejarahnya jumlah perempuan yang duduk di lembaga tersebut tidak lebih dari 2-4 orang saja.

Termarjinalnya perempuan dalam bidang politik, jika dicari akar permasalahannya dapat dikategorikan ke dalam dua faktor, yaitu faktor inheren yang melekat pada diri perempuan itu sendiri dan faktor di luar diri perempuan tersebut. Salah satu faktor di luar diri perempuan yang sangat berpengaruh dalam menentukan keterwakilan perempuan dalam politik adalah faktor struktur dan sistem politik

dimana perempuan tersebut berinteraksi dengan dunia politik. Dengan kata lain intensitas keterlibatan perempuan dalam politik sangat diwarnai oleh model kepolitikan suatu negara dalam suatu masa (waktu).

Di masa Orde Baru, perempuan didomestikasi secara politis yaitu mempolitisasi perempuan, menerapkan ideologi patriarkhi, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan. Realitas ini telah dilegalisasi oleh kepolitikan Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih untuk mempertahankan status quo . Uhlin (1997) mengungkapkan struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru telah turut berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia. Struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru itu dapat ditemui dalam kebijakan-kebijakan sebagai output dari sistem politik, bersemayamnya ideologi patriarkhi dan menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik bagi partai pemerintah terutama menjelang pemilu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kegiatan mobilisasi politik yang dilakukan pemerintah dikenal dengan slogan “tiada hari tanpa penggalangan” dan “satu merekrut sembilan”. Mobilisasi politik yang dijalankan pemerintah terhadap perempuan berimplikasi terhadap format partisipasi politik perempuan era Orde Baru.

Khusus untuk kaum perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina (etnis Tionghoa) kondisi diperparah lagi oleh rezim Orde Baru dengan melakukan politik diskriminasi, sehingga kebebasan politik warga keturunan etnis Cina pun terbelenggu (Hendrik, 2003). Dengan demikian perempuan etnis Cina mengalami *double discrimination* (diskriminasi ganda). Dengan kata lain perempuan etnis Cina

mengalami marjinalisasi yang berlapis, yaitu : *Pertama*, mereka termarjinalisasi dalam kehidupan politik karena mereka perempuan. *Kedua*, termarjinalisasi dalam kehidupan politik karena mereka berasal dari etnis minoritas. Bahkan menurut Saputra (2001) masih ada satu diskriminasi lagi (menjadi *triple discrimination*) khususnya buat kalangan etnis Cina di kota-kota besar, termasuk perempuan di dalamnya bahwa mereka sering menjadi target (seringkali direkayasa atau kambing hitam) kerusuhan massa ataupun tindak kekerasan.

Marjinalisasi politik yang dialami perempuan etnis Cina ditenggarai dalam dua pandangan. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa ketidakaktifan etnis Cina (termasuk perempuan) dalam bidang politik adalah bagian dari usaha mereka untuk tidak menonjol dengan harapan dapat tetap mempertahankan posisi di sektor ekonomi. Pendapat lain mengungkapkan bahwa sumber-sumber politik secara formal memang sengaja disumbat oleh penguasa supaya mereka selalu bergantung kepada kekuasaan politik dan mereka bisa dijadikan "sapi perah" ekonomi dan sekaligus "kambing hitam" jika ada masalah-masalah sosial ekonomi yang akut (Saputra, 2001).

Terlepas dari dua pandangan tersebut, *triple discrimination* yang dialami oleh perempuan kalangan etnis Cina, menyebabkan mereka hanya menjadi objek politik penguasa. Dalam konteks ini, khusus di Kota Padang dari sejumlah 13.538 etnis Cina yang ada (BPS Kota Padang, 2005), tidak satu pun perempuan etnis ini yang berkiprah di berbagai lembaga politik formal yang ada.

Perubahan format politik ke arah yang lebih demokratis membawa pencerahan terhadap aktifitas politik perempuan termasuk perempuan etnis Cina. Terlebih dengan pembaharuan-pembaharuan kebijakan yang dilakukan Gus Dur

sebagai presiden terpilih awal pasca Orde Baru, yaitu mencabut berbagai kebijakan yang menyangkut pencekalan budaya etnis Cina seperti barongsai dan kisah-kisah bernuansa Cina, serta menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional, semakin memberi ruang bagi etnis Cina untuk menunjukkan eksistensinya di berbagai bidang kehidupan termasuk kehidupan politik. Oleh karena itu menarik untuk diteliti : *Bagaimanakah orientasi politik perempuan etnis Cina Kota Padang terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ? Apa harapan-harapan mereka terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ?*

Pengungkapan orientasi politik perempuan etnis Cina tersebut, terkait dengan orientasi kognitif, orientasi afektif, maupun orientasi evaluatif serta harapan-harapan mereka terhadap sistem politik yang akan datang dapat memberikan kontribusi penting bagi penentuan langkah-langkah pemberdayaan mereka di bidang politik. Dengan demikian para pembuat kebijakan dapat meletakkan kepentingan politik perempuan khususnya perempuan etnis Cina sebagai agenda yang pantas mendapat perhatian.

B. Perumusan Masalah

Secara umum masalah yang akan diteliti telah diungkapkan di atas. Untuk memudahkan penelitian, maka secara operasional masalah-masalah yang akan diteliti dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) Kota Padang terhadap kepolitikan pasca Orde Baru, baik menyangkut orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatifnya ?
2. Apakah harapan-harapan perempuan etnis Cina (Tionghoa) Kota Padang terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui orientasi politik perempuan etnis Cina Kota Padang terhadap kepolitikan pasca Orde Baru, baik menyangkut orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatifnya.
2. Mengidentifikasi harapan-harapan perempuan etnis Cina Kota Padang terhadap sistem politik pasca Orde Baru.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Pusat-pusat kajian dan pengembangan peran perempuan untuk menyusun langkah awal dan pedoman kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang politik.
2. Para pembuat kebijakan agar meletakkan kepentingan politik perempuan sebagai agenda yang pantas mendapat perhatian.
3. Pengembangan kepustakaan/teori dalam ilmu politik khususnya tentang gender dan politik, terutama mengetahui orientasi politik perempuan dan sosialisasi politik perempuan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Orientasi Politik.

Orientasi politik warga negara terhadap sistem politik terdiri dari tiga macam. *Pertama*, orientasi *cognitive* yaitu pengetahuan dan keyakinan terhadap sistem politik, peran dan pejabat yang menjalankan peran itu dalam sistem politik, termasuk proses input dan output dari sistem politik. *Kedua*, orientasi *affective* atau perasaan terhadap sistem politik tersebut dan *performance* sistem politik itu. *Ketiga*, orientasi *evaluative* yaitu memberikan penilaian dan opini tentang obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar-standar nilai dan kriteria yang berkenaan dengan informasi dan perasaan. Senada dengan pendapat ini pada bagian lain *Almond* dan *Powell* (1978) juga mengungkapkan tiga orientasi individu terhadap politik, hanya saja perbedaannya mereka memasukkan aspek perasaan senang atau tidak senang (*favourable* atau *unfavourable*) terhadap obyek-obyek politik atau sistem politik secara keseluruhan. Obyek politik yang disoroti oleh ketiga ahli tersebut adalah : *Pertama*, peranan atau struktur khusus dalam sistem politik seperti badan legislatif, eksekutif ataupun birokrasi. *Kedua*, pemegang jabatan seperti pemimpin partai, legislator dan administrator. *Ketiga*, kebijaksanaan, keputusan atau penguatan keputusan dalam bentuk proses pembuatan dan penerapan keputusan tersebut. Sedangkan menurut *Muller* (1977) sebagaimana dikutip *Ratnawati* (1993) obyek politik yang harus dicermati adalah parlemen, pemerintahan nasional, penegak hukum, lembaga peradilan yang bebas dan aktor atau kepemimpinan dari elit politik.

Pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap obyek-obyek politik tersebut akan menggambarkan bagaimana orientasi kognitifnya terhadap suatu model

kepolitikan. Sedangkan orientasi afektifnya menurut Nelson (Ratnawati, 1993) dapat dikelompokkan menjadi *lima tipe sikap politik* yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness* dan *community political knowledge*.

Political involvement dalam hal ini menunjukkan sebagai suatu sikap yang melibatkan suatu interes yang tergeneralisir dalam politik, juga menyangkut suatu kecenderungan untuk mendiskusikan politik dengan orang lain serta suatu pemahaman tentang isu-isu politik. Sikap ini merefleksikan nilai-nilai umum yang menempatkan individu pada potensi keefektifan cara memecahkan masalah politik secara umum.

Tipe kedua adalah *political efficacy*. Dalam hal ini merefleksikan pandangan seseorang terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik. Bila warga negara menampilkan suatu "*sense of political efficacy*" yang tinggi maka mereka memberikan nilai yang tinggi terhadap peranan mereka dalam arena politik. Sementara itu tipe ketiga yaitu *political-trust* yang merefleksikan nilai yang diberikan oleh warga negara terhadap otoritas politik.

Selanjutnya tipe keempat adalah *civic awareness*, dalam hal ini menunjukkan refleksi nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya individu yang mengetahui tentang masalah kemasyarakatan dan sadar akan hal itu serta mempunyai sikap untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Tipe kelima adalah *community political knowledge* dimana sikap pada tipe ini berkaitan dengan dua sikap sebelumnya. Sikap ini terefleksi dari tindakan individu yang sadar tentang situasi riil politik yang terjadi dalam masyarakat dengan bagaimana ia harus bersikap.

Selanjutnya orientasi evaluatif warga negara terhadap obyek politik secara operasional dapat dicermati pandangan warga negara terhadap sistem politik yang ada dengan membandingkan nilai-nilai politik yang dijalankan oleh sistem apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai politik ideal yang dianut oleh individu. Nilai-nilai politik ideal yang dianut individu sangat ditentukan oleh seberapa jauh individu tersebut terlibat dalam proses sosialisasi politik.

Sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola-pola tingkah laku dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya (Almond (ed.), 1978 ; Mas'ood dan MacAndrews, (1986). Semakin tersosialisasi individu/warga negara terhadap politik maka semakin kapabel ia melakukan opini terhadap obyek politik atau pun keseluruhan sistem politik yang diamati. Implikasi dari hal ini adalah warga negara mampu pula memberikan opininya atau harapan-harapannya terhadap suatu sistem politik di masa depan dengan belajar pada suasana politik masa lalu.

Orientasi politik sebagaimana yang telah diuraikan di atas sangat ditentukan oleh bekerjanya suatu sistem politik. Suasana bekerjanya sistem politik dalam suatu rezim disebut dengan kepolitikan. Kepolitikan Orde Baru mencerminkan suasana yang otoriter dan tidak demokratis. Afan Gaffar (1996) lebih jauh merinci beberapa indikator yang membuktikan tidak demokratisnya kepolitikan Orde Baru. *Pertama*, kekuasaan kepresidenan merupakan pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia. Lembaga tersebut merupakan pembentuk dan penentu agenda sosial, ekonomi dan politik nasional. *Kedua*, rotasi kekuasaan hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Camat

dan Kepala Desa. Selama pemerintahan Orde Baru rotasi kekuasaan hanya terjadi pada jabatan wakil presiden akan tetapi pemerintahan secara esensial masih tetap sama. *Ketiga*, rekrutmen politik tertutup. *Political recruitment* merupakan proses pengisian jabatan politik dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam negara yang demokratis, untuk mengisi jabatan politik tersebut semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama. Akan tetapi pada kepolitikan Orde Baru rekrutmen bersifat tertutup dan segala sesuatunya dikontrol dengan ketat oleh lembaga kepresidenan. *Keempat*, penyelenggaraan pemilu yang jauh dari demokratis. Pemilu di Indonesia sejak tahun 1977 dibuat sedemikian rupa agar Golkar dapat memenangkan pemilu dengan mayoritas mutlak, sehingga kemudian Golkar menjadi satu partai hegemonik. *Kelima*, masyarakat belum sepenuhnya menikmati hak-hak dasarnya seperti kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan yang lainnya (Gaffar, 1992).

Pasca Orde Baru yang ditandai oleh pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden tanggal 21 Mei 1998 merupakan *entry point* bagi demokratisasi di Indonesia. Berbagai langkah reformasi politik dilakukan mulai dari struktur, kultur, proses maupun dari segi produk politik. Reformasi struktur politik adalah mereformasi struktur politik yang ada di dalam sistem politik agar dapat berfungsi secara baik dan benar. Struktur-struktur politik yang umumnya dimiliki oleh sistem politik adalah partai politik dan kelompok kepentingan, badan legislatif, eksekutif, birokrasi dan badan peradilan (Almond, 1978).

Reformasi dalam aspek kultur politik adalah mereformasi budaya politik dari budaya politik yang dikembangkan dan didasarkan kepada nilai-nilai tradisi kekeluargaan yang mengutamakan penggunaan emosi di dalam penentuan sikap dan

tingkah laku politik (seperti yang dikenal dengan istilah paternalistik atau pun patron-klien, juga tradisi budaya politik yang tertutup, sentralistis, manipulatif dan sebagainya) menuju budaya politik yang demokratis, mengarah kepada keterbukaan, kejujuran, persamaan dan keadilan. Budaya politik yang demokratis menyangkut suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi (Almond dan Verba, 1990). Selanjutnya budaya politik yang demokratis akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil.

Dalam konteks reformasi proses politik diperlukan upaya untuk memungkinkan terwujudnya mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan negara. Artinya tidak ada lagi pemusatan kekuasaan oleh eksekutif dalam seluruh pelaksanaan proses politik. Apabila kekuasaan eksekutif terlampau dominan tanpa diimbangi oleh kuatnya fungsi legislatif maka akuntabilitas sebagai hal yang sentral dalam demokrasi tidak berjalan. Di lain pihak, apabila badan yudikatif tidak berfungsi secara benar akibat dominasi eksekutif dan lemahnya legislatif akan berimplikasi pada lemahnya aspek kontrol dan penegakan hukum. Proses politik yang demikian pada akhirnya akan menghasilkan produk-produk kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Reformasi dalam hal produk politik sangat berkaitan dengan tiga aspek yang telah dibicarakan sebelumnya. Hal ini disebabkan produk politik berupa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sangat tergantung dari proses politik yang sedang berlangsung. Proses politik ditentukan oleh berjalannya secara baik fungsi-fungsi dari struktur-struktur di dalam sistem politik. Apabila setiap struktur tersebut dapat berfungsi secara benar dan ditunjang oleh kultur politik yang demokratis pada

akhirnya akan menghasilkan produk-produk kebijakan yang memenuhi sebanyak mungkin nilai dan kepentingan warga masyarakat.

Pada tataran empiris, sejak berakhirnya tahapan transisi yang ditandai dengan terbentuknya pemerintahan baru yang *legitimate* sampai dengan saat ini ada beberapa indikator yang mengarah pada pembentukan instalasi demokrasi. Indikator itu antara lain dapat ditunjukkan sebagai berikut : (1) amandemenisasi terhadap UUD 1945 ; (2) ditetapkannya serangkaian ketetapan produk lembaga tertinggi negara yang menjadi dasar reformasi politik ; (3) kekuasaan lembaga kepresidenan dapat dikontrol ; (4) menguatnya peran lembaga legislatif ; (5) kehidupan kepartaian yang sehat ; (6) penguatan masyarakat sipil ; (7) birokrasi yang bersifat netral dan profesional ; (8) pola rekrutmen politik yang terbuka serta mengarah pada profesionalisasi ; (9) pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat mau pun daerah ; (10) otonomi yang seluas-luasnya pada daerah ; (11) partisipasi politik yang otonom ; (12) penghormatan terhadap HAM ; (13) upaya manajemen konflik ; (14) berkurangnya peran militer dalam politik ; dan (14) pelaksanaan pemilu langsung (presiden dan kepala daerah).

Singkatnya instalasi demokrasi yang dibangun sejak masa Gus Dur dan yang masih terus berlangsung saat ini akan mendorong terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi. Sehubungan dengan hal ini Mackie mengatakan sebuah rezim pasca transisi di Indonesia haruslah memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) tidak membangun kekuasaan pribadi yang luar biasa melalui pemusatan berlebihan atas sumber-sumber keuangan untuk mengambil keputusan akhir di satu tangan ; (2) tidak lagi melaksanakan upaya-upaya yang mengekang kegiatan masyarakat dalam politik ; (3) dapat menciptakan nuansa kehidupan politik dan partisipasi politik yang lebih

demokratis ; (4) meninggalkan ciri-ciri sistem pemerintahan yang terpusat dan bersifat patrimonialistik ; (5) dapat menciptakan hubungan yang baik dan terorganisir antara pemerintah dengan berbagai kelompok dalam masyarakat khususnya kelompok Islam ; dan (6) perimbangan kekuatan antara negara dengan masyarakat (Forrester dan R.J. May (eds.), 1998).

Dalam hubungannya dengan penelitian ini orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) dicermati melalui : *Pertama, orientasi kognitif* meliputi pengetahuan dan keyakinan terhadap suatu sistem politik pada umumnya, yang meliputi pemahamannya terhadap peranan struktur, fungsi dan rekrutmen lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam supra struktur politik, yang meliputi lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD Presiden (eksekutif), MA (yudikatif), dan BPK) serta berbagai lembaga yang terbentuk seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Selain itu juga lembaga-lembaga yang berada dalam tataran infra struktur politik seperti peranan partai politik, fungsi partai politik dalam masyarakat dan adanya organisasi-organisasi kepentingan lainnya. Juga dicermati pengetahuan seputar pemilu dan pengetahuan warga negara akan hak dan kewajiban bernegara dan bermasyarakat, dan pengetahuan seputar kepolitikan pasca Orde Baru, baik menyangkut bekerjanya sistem kepolitikan pasca Orde Baru secara umum yang dilihat melalui : (1) lembaga-lembaga pemerintahan, parlemen, lembaga peradilan ; (2) kebijakan atau keputusan yang dihasilkan sebagai output dalam kepolitikan ; (3) dari segi aktor atau kepemimpinan dari elit politik.

Kedua, orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik yang meliputi perasaan terhadap kepolitikan Orde Baru. Perasaan terhadap sistem politik terwujud

dalam tataran *lima tipe sikap* yaitu sikap yang melibatkan suatu interes yang tergeneralisir dalam politik juga menyangkut sikapnya terhadap isu-isu politik (*political involvement*), tipe sikap kedua menyangkut *political efficacy* yaitu sikap seseorang terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik. Tipe sikap ketiga yaitu *political trust* yang merefleksikan nilai yang diberikan warga negara terhadap pelaksanaan otoritas politik. Tipe sikap keempat yaitu sikap warga negara dalam upaya memajukan kesejahteraan bersama (*civic awareness*), serta tipe sikap kelima yaitu *community political knowledge* yaitu sikap yang terefleksi dari individu terhadap situasi riil politik yang terjadi pada masyarakat seperti sikapnya terhadap reformasi politik, dan lain-lain.

Ketiga, orientasi evaluatif warga negara - dalam hal ini perempuan etnis Cina Tionghoa - terhadap sistem politik yang ada dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai politik ideal yang dianut oleh individu. Melalui keseluruhan proses mencermati orientasi politik perempuan tersebut dalam politik, selanjutnya akan diketahui harapan-harapan perempuan terhadap sistem politik pasca kejatuhan Soeharto. Dengan teridentifikasinya harapan-harapan perempuan terhadap sistem politik merupakan suatu langkah awal menuju pemberdayaan perempuan di bidang politik.

B. Perempuan Etnis Cina dalam Kehidupan Politik di Indonesia.

Membicarakan keterlibatan perempuan Etnis Cina dalam kehidupan politik di Indonesia pada hakekatnya tidak terlepas dari kajian seputar keterlibatan perempuan Indonesia secara umum dalam bidang politik. Uniknyanya adalah bahwa keterlibatan perempuan etnis Cina di Indonesia mengalami marginalisasi yang berlapis atau *double* bahkan *triple discrimination*. Pertama, mereka termarginalisasi dalam kehidupan politik dikarenakan mereka perempuan. Kedua, mereka termarginalisasi di

kehidupan politik karena mereka berasal dari etnis minoritas yang seringkali menjadi 'sasaran' bagi penguasa dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang akut. Dikatakan etnis minoritas karena jumlah populasi etnis Cina di Indonesia hanya sekitar 5 juta orang (kurang dari 3%) dari total populasi seluruh Indonesia yang berjumlah 202 juta orang (Freedman, 2000).

Walaupun sebagai etnis minoritas namun jaminan hukum atas aktifitas politik mereka tetap sama sebagaimana pemerintah memberikan jaminan yuridis formal melalui beberapa regulasinya kepada seluruh WNI tanpa kecuali. Jaminan yuridis yang diberikan melalui UUD 1945 adalah merupakan langkah awal bagi perempuan dan laki-laki WNI untuk masuk ke dunia politik. Jika ditelaah lebih lanjut sesungguhnya terdapat beberapa peraturan perpolitikan di Indonesia yang memberikan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut :

- a. UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- b. UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.
- c. UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- e. Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan.
- f. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing (Isbrodroni Suyanto, 2003).

Namun geliat perempuan itu sangat dipengaruhi oleh setting politik penguasa. Di masa parlementer, organisasi perempuan masih mempunyai kebebasan bergerak meskipun masih berada di bawah payung satu partai. Sedangkan di masa Demokrasi Terpimpin, organisasi politik perempuan menjadi berkurang dengan diperkecilnya jumlah partai politik. Tetapi organisasi perempuan di luar partai tidak dilarang untuk

tumbuh. Di masa Orde Baru di mana kekuasaan menjadi sangat terpusat perempuan telah didomestikasi secara sistematis oleh negara. Domestikasi dilakukan melalui tindakan mempolitisasi perempuan, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output yang berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan.

Mempolitisasi perempuan dalam arti menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik partai-partai politik. Kegiatan-kegiatan atau organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan kesejahteraan sosial dan keluarga sehingga PKK pun disebut sebagai gerakan perempuan non politik. Untuk menjaga harmoni dan kestabilan politik, pemerintah mengkooptasi seluruh bentuk-bentuk perwakilan menurut fungsi dan profesi seperti halnya KOWANI.

Struktur korporatisme menurut *Philippe C. Schmitter* (Stepan, 1978), diciptakan untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik kelas. Dalam sistem korporatisme ini pemerintah berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas seluruh organisasi dan menentukan hidup-matinya organisasi. Keadaan ini diperkuat lagi dengan adanya *Panca Tugas* yang dirumuskan oleh Menteri Urusan Peranan Perempuan yaitu (1) sebagai istri yang membantu suami ; (2) sebagai ibu yang mengasuh anak dan mendidik mereka ; (3) sebagai manajer di dalam mengelola rumah tangga bagi suami dan anak ; (4) sebagai pekerja dalam berbagai sektor ; dan (5) sebagai anggota organisasi (Abdullah, 1997). Dari *Panca Tugas* ini tercermin negara menerapkan ideologi *ibuisme* (Murniati, 1998) yang menempatkan perempuan sebagai ibu utama dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

Ideologi tersebut memposisikan perempuan sebagai makhluk yang penuh cinta kasih dan selalu berkorban demi orang lain. Ideologi tersebut kemudian secara politis dimanipulasi untuk mengontrol akses perempuan terhadap berbagai sumber daya dan mempasifikasi perempuan. Senada dengan konsep *ibuisme*, Mies (Abdullah, 1997) menggunakan istilah *housewifization* untuk menunjukkan suatu kondisi dimana perempuan sebagai ibu rumah tangga dianggap peran utama sehingga segenap aspek kehidupan perempuan sangat diwarnai oleh anggapan ini.

Ideologi tersebut melokalisasi perempuan seputar aktivitas domestik serta membatasi geraknya di sektor lain. Ideologi *ibuisme* diciptakan oleh negara dalam rangka melestarikan ideologi patriarki yang identik dengan negara dan laki-laki. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perempuan dari aksesnya terhadap kekuasaan (Mosse dan Anders Uhlin, 1996).

Khusus terhadap etnis Cina (baik perempuan dan laki-laki) rezim Orde Baru selain menerapkan kebijakan politiknya terhadap perempuan WNI secara umum sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, juga melakukan politik diskriminasi. Secara historis politik diskriminasi ini sebenarnya warisan dari penjajah Belanda yang membagi warga negara menjadi tiga, sebagaimana termuat dalam *Reegerings Reglement jo Indische Staatregeling* dan *Nederlandsche Oederdaan Schap van Niet Nederlands* (Kusuma, 2002). Warga negara kelas pertama disebut *privileg* yaitu orang-orang keturunan Eropa. Sementara warga negara kelas dua ialah bangsa Timur Jauh yang didalamnya terdapat etnis Cina dan Arab. Sedangkan warga negara kelas tiga adalah Boemi Poetra. Pada masa Orde Lama dikeluarkan pula politik diskriminatif dengan Peraturan No.10 tahun 1959 tentang larangan bagi usaha

perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibukota daerah swatanra I dan II (daerah tingkat I dan II). Rezim Orde Baru mengeluarkan Keppres No.52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk, dengan mewajibkan keturunan etnis Cina mengisi model K-1. Hal ini kemudian diperkuat oleh SKBRI Peraturan Menteri Kehakiman No.JB3/4/12 tahun 1978 (Hendrik, 2003). Peraturan-peraturan diskriminatif ini tentu mempengaruhi proses kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang politik.

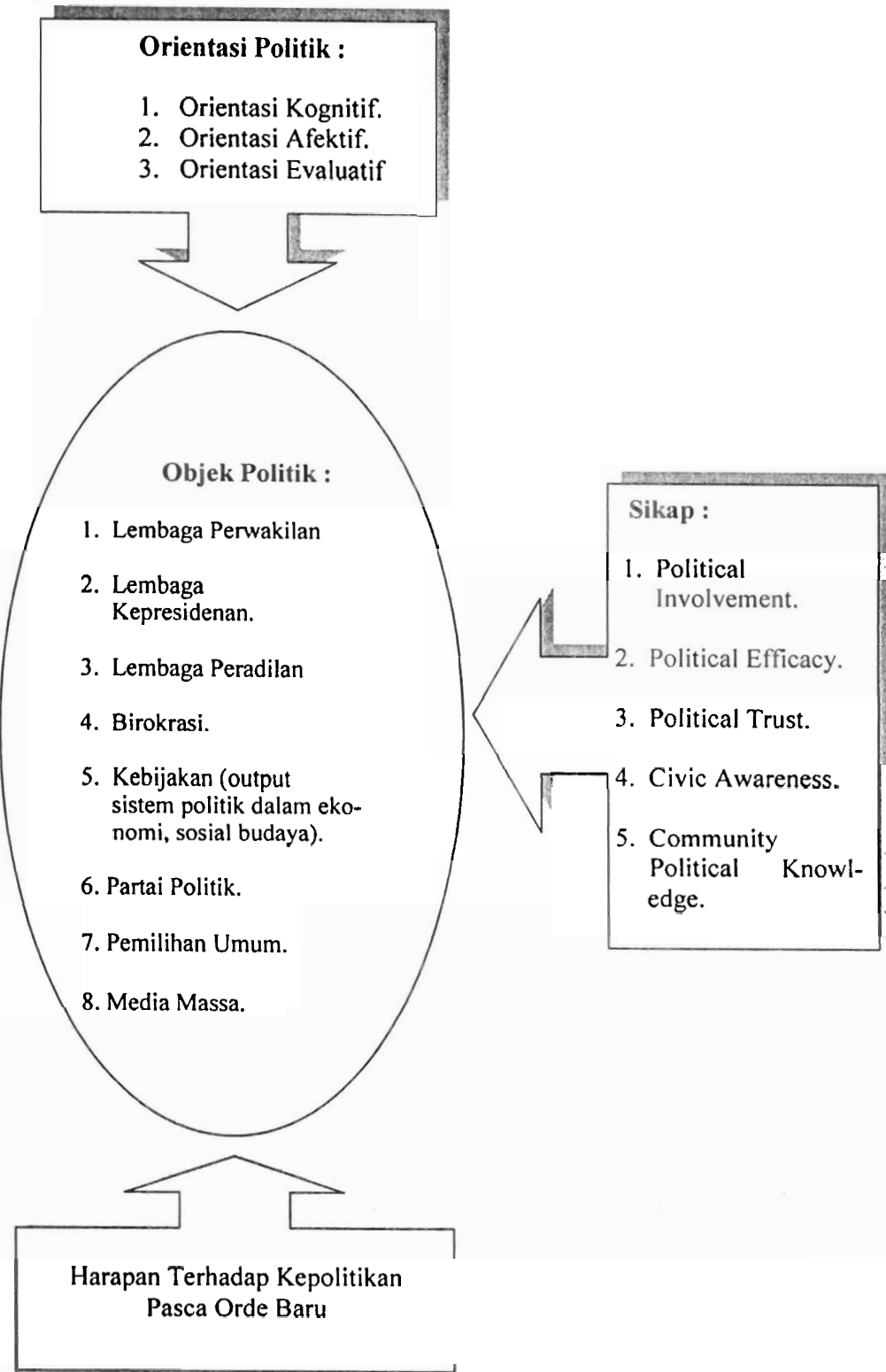
Secara umum partisipasi politik etnis Cina di Indonesia dibagi dalam dua bentuk. Pertama, secara formal melalui partai politik berasimilasi dimana masyarakat etnis Cina (baik perempuan atau laki-laki) yang tertarik pada politik dapat berpartisipasi melalui partai politik pribumi. Sebagai contoh pada masa Orde Baru berintegrasi dengan Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Para tokoh terkenal dari etnis Cina antara lain Yusuf Wanandi (nama asli Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Khoen) dan Djoko Sudyatmiko (Lie Giok Hauw) (Suryadinata, 1992). Kedua, bentuk partisipasi informal mencakup aktivitas organisasi-organisasi non politik dan kelompok-kelompok penekan. Sebut saja contohnya Badan Komunikasi (Bakom) yang dibentuk Pemerintah Orde Baru tahun 1977 yang berfungsi sebagai badan penghubung antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa. Contoh lain organisasi Prasetya Mulya yang didirikan tahun 1980 merupakan sebuah yayasan yang berkepentingan membantu pemerintah melaksanakan program-program sosial. Eksistensi kelompok-kelompok penekan dari etnis Tionghoa ini tidak terlalu menonjol. Dalam konteks ini terdapat pandangan bahwa ketidakaktifan etnis Tionghoa dalam bidang politik merupakan strategi mereka mempertahankan posisi di

sektor ekonomi. Disamping itu juga ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak aktifnya etnis ini di bidang politik sebagai implikasi dari kebijakan penguasa yang menyumbat sumber-sumber politik formal. Tujuannya adalah untuk membangun ketergantungan mereka kepada kekuasaan politik (Saputra, 2001).

Perubahan format politik ke arah yang lebih demokratis membawa pencerahan bagi etnis minoritas ini untuk berkiprah dalam bidang politik. Satu langkah kongkrit yang ditempuh pada era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah mencabut berbagai kebijakan yang menyangkut pencekalan budaya etnis Tionghoa seperti barongsai, yang kembali hadir di tengah-tengah perayaan imlek dan kisah-kisah bernuansa Cina pun bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka sebelumnya serta permasalahan yang menjadi fokus kajian, maka dapat kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagaimana yang tampak pada diagram pada halaman berikut ini.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan *mixing method*, yaitu memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk memetakan kecenderungan jawaban responden.

Menurut *Masri Singarimbun* (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba mencermati gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, khususnya fenomena politik. Sedangkan *Vredenberg* (1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya, jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian.

B. Responden Penelitian.

Responden penelitian ini adalah perempuan etnis Cina (Tionghoa) di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Jumlah responden penelitian ditetapkan dengan menggunakan formula Frank Lych sebagai berikut :

$$n = \frac{NZ}{Nd} + \frac{p(1-p)}{Z(1-p)}$$

dimana : n = jumlah sampel/responden.
 N = jumlah populasi
 Z = nilai variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%.
 p = harga patokan tertinggi (0,50).
 d = sampling error (0,10) (Surachmad, 1989).

Sehubungan dengan jumlah populasi dalam hal ini perempuan etnis Cina (Tionghoa) di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berjumlah 1.940 orang, maka jumlah responden/sampel penelitian ini berdasarkan formula Frank Lynch tersebut adalah :

$$n = \frac{1940 \cdot (1,96)^2 \cdot (0,50) (1 - 0,50)}{1940 \cdot (0,10)^2 + (1,96)^2 (1 - 0,50)}$$

$$n = \frac{1940 \cdot (3,8416) \cdot (0,50) \cdot (0,50)}{1940 \cdot (0,01) + (3,8416) (0,50)}$$

$$n = \frac{(7452,704) \cdot (0,25)}{19,4 + 1,9208}$$

$$n = \frac{1863,176}{21,3208}$$

$$n = 87,39$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, maka diperoleh jumlah sampel/responden penelitian ini adalah 87 orang.

C. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung dari informan penelitian terdiri dari data : (1) orientasi politik yang meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif ; dan (2) harapan-harapannya terhadap kepolitikan pasca Orde Baru. Disamping itu juga data sekunder mengenai hal-hal yang menunjang upaya pengungkapan jawaban dan pertanyaan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket dan wawancara mendalam (*depth interview*). Alat yang digunakan adalah daftar pertanyaan bersifat terbuka dan tertutup serta pedoman wawancara.

D. Teknik Pengujian Keabsahan Data.

Untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Menurut Patton, (1990) triangulasi dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data ; dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metoda yang sama. Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan strategi pertama.

E. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dari sumber data diolah secara kualitatif melalui analisis isi. Kongkrintnya ada empat cara yang digunakan dalam mengembangkan analisis. *Pertama*, untuk mendeskripsikan orientasi kognitif responden digunakan teknik analisis isi dengan cara mengembangkan kategori bertingkat yaitu *sangat paham, agak paham, kurang paham, dan tidak paham sama sekali*. Sangat paham (SP) dicirikan dengan kemampuan responden untuk mendefinisikan, membedakan, mendeskripsikan dengan tepat pengetahuan dan pemahaman tentang suasana kepolitikan pasca Orde Baru yang ditanyakan. Agak paham (AP) ditandai dengan kemampuan responden mendefinisikan, membedakan, dan mendeskripsikan yang kurang tepat tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap kepolitikan pasca Orde Baru. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang kepolitikan pasca Orde Baru yang

sebagian-sebagian dikategorikan ke dalam kurang paham (KP). Terakhir, bila jawaban responden tidak tepat sama sekali ataupun tidak memberikan jawaban, maka dikategorikan ke dalam tidak paham sama sekali (TPSS).

Analisis *kedua*, menyangkut orientasi afektif yang dijangkau melalui lima tipe sikap yaitu : *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness*, dan *community political knowledge*. Jawaban dari responden dikembangkan ke dalam tiga kategori kualitatif, yaitu *sangat baik*, *baik*, dan *kurang baik*. Sangat baik (SB) dicirikan dengan kemampuan responden dalam menuliskan dengan tepat sikap yang seharusnya mereka ambil dalam suasana kepolitikan tertentu berikut pemecahannya. Baik (B) dicirikan dengan kemampuan responden menuliskan sikap yang seharusnya mereka ambil dalam suasana kepolitikan tertentu, namun pada beberapa hal kurang lengkap dan tidak menggambarkan pemecahan masalah secara menyeluruh. Kurang baik (KB) dicirikan pada kemampuan yang sangat kurang dari responden dalam menyatakan sikap ataupun memecahkan masalah.

Selanjutnya analisis *ketiga*, menyangkut tentang orientasi evaluatif. Jawaban responden yang terjangkau dikelompokkan ke dalam *sangat baik (SB)* apabila mereka mampu menilai atau memberi opini secara tepat bagaimana suasana kepolitikan pasca Orde Baru yang sesungguhnya. *Baik (B)* apabila kurang lengkap dalam memberikan penilaian atau opini terhadap kepolitikan pasca Orde Baru. Sedangkan pengklasifikasian *kurang baik (KB)* didasari oleh kurang tepatnya penilaian atau opini responden terhadap kepolitikan pasca Orde Baru yang sesungguhnya. Sementara itu, *tidak tahu sama sekali (TPSS)* apabila responden sama sekali tidak mampu memberikan penilaian atau opini terhadap suasana kepolitikan pasca Orde Baru.

Akhirnya *analisis keempat*, tentang harapan-harapan responden dideskripsikan sesuai dengan pengelompokkan jawaban responden berdasarkan tema-tema yang ingin dijaring. Pada setiap tema ditampilkan kecenderungan jawaban responden. Kecenderungan jawaban tersebut ditampilkan secara deskriptif kuantitatif yaitu melalui prosentase normal.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan dua bagian penting dari penelitian yang dilakukan. *Pertama*, temuan umum penelitian berupa pendeskripsian lokus penelitian dan karakteristik responden. *Kedua*, temuan khusus berupa pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu :

1. Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru yang dirinci menjadi tiga bagian yaitu : (a) Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari orientasi kognitif ; (b) Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari orientasi afektif ; dan (c) Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari orientasi evaluatif.
2. Deskripsi tentang harapan-harapan perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru.

A. Temuan Umum.

1. Deskripsi Lokasi Penelitian.

Untuk mengungkapkan bagaimana orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru dipilih secara sengaja lokasi penelitian adalah Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh karena mayoritas etnis Cina (Tionghoa) Kota Padang berdomisili di sini. Perkampungan Cina (Tionghoa) ini oleh masyarakat Kota Padang disebut sebagai wilayah/ kawasan pecinan.

Menurut sejarahnya wilayah pecinan atau perkampungan Kampung Pondok awalnya dibangun pada tahun 1673 seiring dengan kedatangan imigran Cina yang

dibawa oleh VOC sebagai tenaga kerja. Menurut Freek Colombijn (dalam Erniwati, 2007), komunitas Cina ini semakin meningkat sejak Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1682 yang mengangkat Lie Maa Saay sebagai Letnan Tionghoa pertama di Padang untuk mengkoordinasikan kehidupan mereka. Sejak itu kampung pecinan menjadi pilihan bagi keturunan Cina (Tionghoa) untuk menetap dan mengembangkan kehidupannya.

Kelurahan Kampung Pondok merupakan hasil penggabungan wilayah dan administrasi dari lima kelurahan yaitu Kelurahan Pondok, Kelurahan Tanah Kongs, Kelurahan Kali Kecil, Kelurahan Kampung Dobi, dan Kelurahan Simpang Enam. Adapun penggabungan lima kelurahan menjadi satu Kelurahan Kampung Pondok bertujuan untuk membenahi seluruh aspek pelayanan publik agar tercipta sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien, sehingga benar-benar dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong kreatifitas di segala bidang.

Kelurahan Kampung Pondok memiliki luas wilayah 39 ha yang tersebar dalam 11 Rukun Warga (RW) dan 33 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas kelurahan ini adalah sebelah utara dengan Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Belakang Tangsi dan Kelurahan Berok Nipah serta sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan. Dari segi pemerintahan, Kelurahan Kampung Pondok dipimpin oleh lurah, sekretaris lurah, dan dibantu oleh empat orang kepala seksi (kasi), yaitu kasi pemerintahan, kasi pemberdayaan masyarakat, kasi sosial dan kasi pelaksanaan umum dan IMB serta dibantu oleh empat orang staf.

Kelurahan Kampung Pondok memiliki ketinggian 1,5 meter dari permukaan laut. Sementara jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 1,5 km, dari pusat kota \pm 1,5 km, dan dari pusat provinsi \pm 2 km. Wilayah ini didiami oleh 5.175 orang penduduk yang terdiri dari 2.559 laki-laki dan 2.616 perempuan dengan 1.274 kepala keluarga. Penduduk WNI keturunan etnis Cina (Tionghoa) menurut penjelasan yang disampaikan oleh aparat kelurahan adalah 3.892 orang, separoh diantaranya adalah perempuan. Keturunan etnis Cina (Tionghoa) di Kota Padang terdiri dari berbagai suku ataupun dialek bahasa yaitu Kelompok Hokkian yang merupakan kelompok terbesar sekitar 80%, Kelompok Hakka sekitar 5%, dan Kelompok Kwangtung 15%. Kelompok-kelompok ini dalam pergaulan sehari-hari membentuk ikatan keluarga, mereka juga membentuk ikatan-ikatan perhimpunan di bidang kesenian, kematian, sampai pada perhimpunan tradisional dan arisan.

Bila dilihat dari sebaran penganut agama, penduduk kelurahan ini terdistribusi sebagai berikut : Islam 22,22%, Kristen 2,99%, Katholik 60%, Hindu 4,77%, dan Budha 10,2%. Sementara itu 66,1% penduduk masih aktif menjalani proses pendidikan yang stratifikasinya terdistribusi sebagai berikut : TK 2,71%, SD 14,19%, SLTP 11,9%, SLTA 33,37%, Diploma dan Sarjana 3,39%. Sementara pekerjaan penduduk pada umumnya (75%) diantaranya adalah swasta dan wiraswasta. Melihat kondisi ini wajarlah bila visi Kelurahan Kampung Pondok adalah terwujudnya pusat perdagangan, jasa, pariwisata, dan budaya yang madani.

2. Karakteristik Responden.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang menggunakan formula Frank Lynch, jumlah sampel adalah 87 orang perempuan etnis Cina (Tionghoa). Adapun

karakteristik responden ditinjau dari segi umur, agama, pekerjaan, dan pendidikan terakhir akan dipaparkan berikut ini.

Ditinjau dari segi umur, maka distribusi responden tergambar pada tabel 1.

Tabel 1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur (tahun)	f	%
1.	17 – 23	24	27,59
2.	24 – 35	20	22,99
3.	36 – 47	28	32,18
4.	48 - 55	15	17,24
Jumlah		87	100

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa proporsi terbesar responden berada pada umur 36-47 tahun yaitu 32,18% dan yang terkecil berumur 48-55 tahun sejumlah 17,24%. Sedangkan gambaran tentang agama yang dianut responden dapat dicermati melalui tabel 2 berikut.

Tabel 2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

No.	Agama	f	%
1.	Katholik	48	55,17
2.	Kristen	19	21,84
3.	Budha	20	22,99
Jumlah		87	100

Data yang direkam oleh tabel di atas memberi penjelasan bahwa mayoritas responden beragama Katholik. Sementara responden yang beragama Kristen dan Budha relatif seimbang. Selanjutnya bagaimana distribusi responden menurut jenis pekerjaan terangkum pada tabel 3.

Tabel 3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	f	%
1.	Rumah tangga	37	42,53
2.	Mahasiswa	10	11,49
3.	Swasta	21	24,14
4.	Wiraswasta	19	21,84
Jumlah		87	100

Data pekerjaan responden sebagaimana diungkapkan tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai ibu rumah tangga yaitu 42,53%, sementara yang lainnya bekerja sebagai swasta dan wiraswasta dengan proporsi berimbang yaitu masing-masing 24,14% dan 21,84%. Sedangkan mahasiswa hanya 11,49%.

Karakteristik responden berikut yang akan dipaparkan adalah tingkat pendidikannya. Hal ini tergambar melalui tabel 4.

Tabel 4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	f	%
1.	SD	10	11,49
2.	SLTP	22	25,29
3.	SLTA	37	45,53
4.	Diploma	12	13,79
5.	Sarjana	6	3,9
Jumlah		87	100

Tabel 4 menunjukkan bahwa lapisan terbesar dari responden berpendidikan menengah yaitu sebesar 70,82%. Sementara itu relatif kecil proporsi responden yang berpendidikan SD, Diploma, dan Sarjana.

B. Temuan Khusus dan Pembahasan.

Pemaparan berikut ini berhubungan dengan dua persoalan utama yang menjadi fokus kajian penelitian ini, yaitu :

1. Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru yang dirinci menjadi tiga bagian yaitu :
 - a. Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari aspek kognitif.
 - b. Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari aspek afektif.

- c. Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari aspek evaluatif.
2. Harapan-harapan perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru.

1. Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru.

Untuk mengetahui gambaran orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru akan disajikan ke dalam tiga bagian sub orientasi, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Penyajian ketiga orientasi ini pada akhirnya akan menggambarkan orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru.

a. Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Kognitif.

Pertanyaan yang dikemukakan kepada responden untuk menggali orientasi kognitifnya, baik berupa pengetahuan, pemahaman, dan keyakinannya terhadap kepolitikan pasca Orde Baru dikelompokkan atas tema sebagai berikut : (1) pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan ; (2) kekuasaan kepresidenan pasca Orde Baru ; (3) sistem peradilan pasca Orde Baru ; (4) pelayanan birokrasi ; (5) kebijakan pasca Orde Baru ; (6) pemahaman terhadap partai politik pasca Orde Baru ; (7) pengetahuan tentang pemilu pasca Orde Baru ; dan (8) pengetahuan tentang kebebasan pers pasca Orde Baru.

Jawaban responden terhadap pertanyaan digolongkan pada kategori kualitatif sangat paham (SP), agak paham (AP), kurang paham (KP), dan tidak paham sama

sekali (TPSS). Adapun penyebaran jawaban responden secara lengkap dapat dicermati melalui tabel berikut.

Tabel 5 : Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kebijakan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Kognitif.

No.	Orientasi Kognitif Berdasarkan Tema		Kategori Jawaban			
			SP	AP	KP	TPSS
1.	Pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan.	Legislasi	15 (17,24%)	12 (13,80%)	8 (9,19%)	52 (59,77%)
		Anggaran	9 (10,34%)	11 (12,64%)	27 (31,03%)	40 (45,99%)
		Pengawasan	9 (10,34%)	18 (20,69%)	34 (39,08%)	28 (32,18%)
2.	Kekuasaan Kepresidenan pasca Orde Baru.		49 (56,32%)	10 (11,49%)	21 (24,14%)	7 (8,05%)
3.	Sistem peradilan pasca Orde Baru.	Pengadilan hukum	12 (13,80%)	57 (65,52%)	9 (10,34%)	9 (10,34%)
		Penyelesaian kasus	23 (26,44%)	47 (54,02%)	10 (11,49%)	7 (8,05%)
4.	Pelayanan birokrasi.		8 (9,19%)	12 (13,80%)	35 (40,23%)	32 (36,78%)
5.	Kebijakan pasca Orde Baru.		15 (17,25%)	10 (11,49%)	10 (11,49%)	52 (59,77%)
6.	Pemahaman terhadap partai politik pasca Orde Baru.	Pengertian	7 (8,05%)	12 (13,80%)	43 (49,43%)	25 (28,72%)
		Peranan	28 (32,18%)	21 (24,14%)	11 (12,64%)	27 (31,04%)
7.	Pemahaman terhadap pemilu.		21 (24,14%)	48 (55,17%)	12 (13,80%)	6 (6,89%)
8.	Pengetahuan tentang kebebasan pers.		9 (10,34%)	6 (6,89%)	45 (51,73%)	27 (31,04%)

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa secara umum orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kebijakan pasca Orde Baru ditinjau dari orientasi kognitif masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Namun secara khusus pada tema-tema tertentu seperti kekuasaan kepresidenan pasca Orde Baru, sistem peradilan pasca Orde Baru, dan pemahaman terhadap pemilu ditanggapi

responden dengan sangat paham. Ketiga tema ini termasuk *hot issue* dan mengalami banyak pembenahan pasca Orde Baru, serta secara intens termasuk kategori yang selalu menjadi bahan pemberitaan media massa. Diasumsikan hal tersebut berkontribusi terhadap baiknya orientasi kognitif responden. Dalam konteks kekuasaan kepresidenan terlihat 56,32% tergolong sangat paham, 11,49% tergolong agak paham, sementara hanya 8,05% yang tergolong tidak paham sama sekali.

Pencermatan lebih lanjut dari jawaban responden yang sangat paham adalah pada tema sistem peradilan pasca Orde Baru. Temuan penelitian dalam tema penegakan hukum menunjukkan 13,8% responden menjawab dalam kategori sangat paham, 66,52% agak paham, dan hanya 20,68% yang menjawab dalam kategori kurang paham dan tidak paham sama sekali. Sementara untuk tema penyelesaian kasus, distribusi jawaban responden sebagai berikut : 26,44% tergolong sangat paham, 54,02% agak paham, 11,49% kurang paham, dan 8,05% tidak paham sama sekali.

Kemudian pada tema pemahaman terhadap pemilu, yang termasuk salah satu *hot issue*, distribusi jawaban responden 24,14% sangat paham, 55,17% agak paham, 13,8% kurang paham, dan hanya 6,89% yang tidak paham sama sekali.

Kecenderungan pemahaman yang sangat positif pada tiga tema diatas ternyata tidak ditemui dalam lima tema lainnya. Bila dicermati lagi tabel 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari aspek kognitif masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Kenyataan ini dapat dideteksi dari jumlah jawaban responden yang terbanyak pada kategori kurang paham dan tidak paham sama sekali. Terutama sekali pada sebagian besar tema-tema yang menyangkut

pengetahuan dasar politik, diantaranya menyangkut pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan, pelayanan birokrasi, kebijakan pasca Orde Baru, pemahaman terhadap partai politik dan pengetahuan terhadap kebebasan pers pasca Orde Baru.

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dasar politik seperti pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dari lembaga perwakilan terlihat 68,96% responden tergolong kurang paham dan tidak paham sama sekali. Pada fungsi anggaran, persentase kedua katgeori ini mencapai 77,02%. Sementara itu pada fungsi anggaran mencapai 71,26%. Hasil ini menunjukkan superfisialnya pengetahuan dan pemahaman responden terhadap pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan.

Dangkalnya orientasi kognitif responden juga terlihat pada tema pelayanan birokrasi, kebijakan pasca Orde Baru, dan pengetahuan tentang kebebasan pers pasca Orde Baru. Untuk tema pelayanan birokrasi kecenderungan jawaban responden pada kategori kurang paham dan tidak paham sama sekali mencapai 77,01%. Untuk tema kebijakan pasca Orde Baru sejumlah 71,26%, sedangkan dalam tema tentang kebebasan pers pasca Orde Baru terdapat persentase yang lebih besar yaitu sejumlah 82,77%.

Namun hal menarik yang dapat dicermati berkaitan dengan tema pemahaman terhadap partai politik. Dalam sub tema ini hanya 8,05% responden yang sangat paham, dan 13,80% agak paham. Selebihnya yaitu sejumlah 78,15% responden berada pada kategori kurang paham dan tidak paham sama sekali. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan sub tema tentang peranan partai politik, dimana terdapat perimbangan kategori jawaban responden. Bila jawaban responden dipilah menjadi dua kelompok memahami dan tidak memahami peranan partai politik, maka proporsinya masing-masing adalah 56,32% dan 43,68%.

Sepanjang data yang diungkapkan sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari orientasi kognitif adalah masih rendah atau tidak terlalu dalam. Masih rendah atau tidak terlalu dalamnya hal tersebut terjaring melalui tema-tema yang menyangkut pengetahuan-pengetahuan dasar kepolitikan yang ada dalam sistem politik. Namun beberapa tema yang menyangkut *hot issue* pasca kejatuhan Orde Baru dipahami dengan sangat baik oleh responden. Tema-tema itu adalah kekuasaan kepresidenan, sistem peradilan, dan pemilu pasca Orde Baru. Pemahaman positif terhadap hal ini ditunjang oleh tuntutan agenda reformasi politik yang harus diwujudkan oleh rezim. Kekuasaan kepresidenan pasca Orde Baru terutama presiden terpilih secara langsung dimana kadar legitimasinya sangat ditentukan oleh suara rakyat menjadi perhatian bagi perempuan etnis Cina (Tionghoa) sehingga pemahaman mereka terhadap hal ini menjadi positif. Demikian juga pemahaman positif mereka terhadap sistem peradilan pasca Orde Baru. Terlepas dari keberhasilan suatu rezim, agenda reformasi politik yang dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) untuk memberantas korupsi telah menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem peradilan baik yang menyangkut penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus hukum terutama yang terkait dengan korupsi. Salah satu gebrakan berarti yang dilakukan oleh SBY-JK dalam penegakan hukum adalah memberikan independensi yang tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani indikasi korupsi atas Aulia Pohan besannya SBY, sehingga pada akhirnya KPK menetapkan besan SBY tersebut sebagai tersangka.

Sementara itu dari segi pengetahuan responden tentang pemilu pasca Orde Baru terungkap jawaban yang positif, dimana 79,81% responden dapat mendeskripsikan perbedaan pemilu pasca Orde Baru dengan masa-masa sebelumnya. Namun bila dilihat secara keseluruhan, ternyata sepuluh tahun reformasi politik yang ditandai dengan era transisi menuju demokratisasi tidak juga memberikan pencerahan politik bagi perempuan etnis Cina (Tionghoa) untuk mengetahui/melek politik politik apalagi terlibat dalam bidang politik itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan salah seorang responden (LW) terungkap hal berikut

"Sebagai WNI keturunan, saya merasa tidak terlalu tahu tentang politik, berpolitik itu tidak menjadi hobi. Walaupun pemerintahan telah berganti tapi tidak ada pengaruh bagi kami. Kami hanya ingin maju berbisnis di Indonesia dan jangan didiskriminasikan."

Pernyataan senada sering diungkapkan oleh responden manakala kita ingin menjangring jawaban yang lebih mendalam. Ketidaktahuan (kedangkalan) pemahaman tentang kepolitikan pasca Orde Baru membuat mereka menjawab tidak tahu atau tidak paham sama sekali.

2. Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Afektif.

Pertanyaan yang dikemukakan kepada responden untuk menggali orientasi afektifnya diarahkan pada penampilan lima tipe sikap yaitu : *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness*, dan *community political knowledge*.

Lima tipe sikap tersebut dijaring melalui jawaban responden terhadap tema-tema berikut ini. Tema-tema guna menjangring *political involvement* adalah : (1) sikap terhadap keingintahuan terhadap informasi politik ; dan (2) sikap terhadap keikutsertaan mendiskusikan masalah-masalah politik. Selanjutnya *political efficacy*

dijaring dengan tema-tema berikut : (1) sikap terhadap keikutsertaan dalam pemilu ; dan (2) sikap terhadap aktifitas-aktifitas politik yang pernah diikuti.

Sementara itu, tema-tema untuk menjaring *political trust* adalah : (1) sikap percaya terhadap pemerintahan SBY-JK ; dan (2) sikap terhadap peran peradilan pasca Orde Baru. Sedangkan tema-tema guna menjaring *civic awareness* berkaitan dengan : (1) sikap terhadap peran pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan ; dan (2) sikap terhadap memperjuangkan kepentingan bersama. Akhirnya, *sense of community political knowledge* meliputi tema berikut : (1) sikap terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ; dan (2) sikap terhadap konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Jawaban responden terhadap pertanyaan digolongkan kepada kategori kualitatif yang terdiri dari sangat baik (SB), baik (B), dan kurang baik (KB). Adapun sebaran jawaban responden secara lengkap dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 6 : Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Afektif.

No.	Orientasi Afektif (Penampilan Lima Tipe Sikap)		Kategori Jawaban		
			SB	B	KB
1.	<i>Sense of Political Involvement</i>	a. Sikap terhadap keingintahuan terhadap informasi di bidang politik.	7 (8,05%)	14 (16,09%)	66 (75,86%)
		b. Sikap terhadap keikutsertaan mendiskusikan masalah-masalah politik.	5 (5,75%)	10 (11,49%)	72 (82,76)
2.	<i>Sense of Political Efficacy</i>	a. Sikap terhadap keikutsertaan dalam pemilu.	27 (31,03%)	13 (14,94%)	47 (54,03%)
		b. Sikap terhadap aktifitas-aktifitas politik yang pernah diikuti	8 (9,19%)	11 (12,64%)	68 (78,17%)
3.	<i>Sense of Political Trust.</i>	a. Sikap percaya terhadap pemerintahan SBY-JK.	51 (58,63%)	14 (16,09%)	22 (25,28%)
		b. Sikap terhadap peradilan pasca Orde Baru.	42 (48,26%)	20 (22,99%)	25 (28,75%)
4.	<i>Sense of Civic Awareness.</i>	a. Sikap terhadap peran pemerintah menuntaskan kemiskinan.	32 (36,78%)	14 (16,09%)	35 (47,13%)
		b. Sikap terhadap memperjuangkan kepentingan bersama.	18 (20,69%)	11 (12,64%)	58 (66,67%)
5.	<i>Sense of Community Political Knowledge</i>	a. Sikap terhadap kenaikan harga BBM.	17 (19,54%)	38 (43,68%)	32 (36,78%)
		b. Sikap terhadap konflik yang terjadi dalam pilkada.	14 (16,09%)	27 (31,03%)	46 (52,88%)

Dari tabel 6 dapat disimpulkan secara umum orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari orientasi afektif tergolong dalam kategori sikap yang pasif (rendah) ataupun kurang baik. Hal ini terindikasi dari empat penampilan tipe sikap yaitu *sense of political involvement*, *sense of political efficacy*, *sense of civic awareness*, dan *sense of community political knowledge*. Sedangkan pada penampilan sikap *sense of political trust* terlihat dominasi sangat baik dan baik (positif).

Bila dikaitkan dengan analisis sebelumnya mengenai orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari aspek kognitif adalah sejalan (paralel). Rendah atau masih superfisialnya kedalaman pengetahuan yang dimiliki perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan

pasca Orde Baru diikuti pula oleh rendahnya (negatif) atau kurang baiknya sikap yang ditunjukkan terhadap kepolitikan pasca Orde Baru.

3. Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Evaluatif.

Orientasi evaluatif responden terhadap suasana kepolitikan pasca Orde Baru dijangar melalui beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tema-tema berikut : (1) kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi ; (2) peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ; dan (3) kepemimpinan SBY-JK dan prospeknya pada pemilu 2009.

Jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut digolongkan ke dalam kategori kualitatif yang terdiri dari sangat baik (SB), baik (B), kurang baik (KB), dan tidak tahu sama sekali (TTSS). Adapun jawaban responden secara lengkap terlihat pada tabel 7.

Tabel 7 : Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Evaluatif.

No.	Orientasi Evaluatif Berdasarkan Tema	Kategori Jawaban			
		SB	B	KB	TTSS
1.	Kinerja KPK dalam memberantas korupsi.	9 (10,34%)	12 (13,79%)	35 (40,23%)	31 (35,64%)
2.	Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	14 (16,09%)	10 (11,49%)	29 (33,33%)	34 (39,09%)
3.	Kepemimpinan SBY-JK dan prospeknya pada pemilu 2009.	49 (56,32%)	21 (24,14%)	10 (11,49%)	7 (8,05%)

Tabel di atas memberikan indikasi bahwa dari dimensi evaluatif, orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru adalah sangat rendah pada dua tema, yaitu tema kinerja KPK dalam memberantas korupsi dan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan

pada tema ketiga, kepemimpinan SBY-JK dan prospeknya pada pemilu 2009 ternyata responden memberikan penilaian yang sangat baik dan baik.

Rendah atau kurang tepatnya penilaian yang diberikan responden terhadap tema pertama dan kedua, sejalan dengan dua aspek orientasi politik yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu orientasi kognitif dan orientasi afektif. Sementara pada tema ketiga, responden memberikan penilaian yang positif, dan hal ini juga sejalan dengan orientasi kognitif menyangkut tema kekuasaan kepresidenan.

Pada tema kinerja KPK, terlihat distribusi responden sangat baik 10,34%, baik 13,79%, kurang baik 40,23%, dan tidak tahu sama sekali 35,64%. Padahal agenda pemberantasan korupsi menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan SBY-JK. Seharusnya pada tema ini responden menjawab dengan sangat tepat namun temuan penelitian ternyata sebaliknya. Hal yang sama juga terungkap pada tema kedua, peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan : *Pertama*, secara umum orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari aspek kognitif adalah masih superfisial atau tidak terlalu dalam, khususnya menyangkut pengetahuan-pengetahuan dasar dalam sistem politik. Namun untuk tema-tema yang menyangkut *hot issue* ternyata pengetahuan dan pemahaman mereka sangat positif. *Kedua*, secara umum orientasi afektif perempuan etnis Cina (Tionghoa) yang terjaring melalui lima tipe sikap dapat dikategorikan pada sikap pasif (rendah), kecuali pada penampilan *sense of political trust*. *Ketiga*, kecenderungan dangkalnya pengetahuan responden ternyata paralel dengan penilaian yang diberikannya terhadap kepolitikan pasca Orde Baru. Tepatnya penilaian

responden terhadap tema-tema yang dijangar masih dalam kategori sangat rendah (kurang tepat).

4. Harapan-harapan Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru.

Untuk mengidentifikasi bagaimana harapan-harapan perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Harapan responden terhadap upaya peningkatan partisipasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa).
- b. Harapan responden terhadap pelaksanaan pemilu 2009 yang akan datang.
- c. Harapan responden terhadap pelayanan birokrasi yang diharapkan.

Jawaban atas pertanyaan di atas akan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing tema. Tema pertama berhubungan dengan harapan responden terhadap upaya peningkatan partisipasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terungkap sebagai berikut : 61 (70,11%) dari responden berharap agar pemerintah serius memperhatikan golongan minoritas dan menghilangkan sikap diskriminatif yang mereka rasakan, memberikan perhatian dengan program-program kongkrit seperti pelatihan-pelatihan dan berbagai kegiatan positif lainnya di bidang politik. Sementara jawaban lainnya, 17 (19,54%) responden mengatakan meragukan apakah mereka memiliki harapan dalam bidang politik. Sedangkan 9 (10,35%) lainnya memberikan jawaban menyimpang dari substansi yang ditanyakan.

Selanjutnya tema yang kedua, yaitu harapan responden terhadap pelaksanaan pemilu 2009 yang akan datang. Dari jawaban responden terungkap harapan mereka adalah 70 (80,46%) berharap agar pemilu berikutnya tetap terlaksana dalam prinsip jujur dan adil serta lebih transparan. Administrasi pemilu juga lebih ditertibkan

sehingga semua masyarakat bisa terdata dan dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara 17 (19,54%) lainnya memandang bahwa pemilu yang diselenggarakan sekarang sudah cukup baik.

Kemudian sehubungan dengan pelayanan birokrasi/aparat pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik 81 (93,1%) berharap agar pemerintah tetap berpegang pada peraturan, tidak pilih kasih dalam melayani. Sementara sisanya 6,9% memandang pelayanan birokrasi pasca Orde Baru sudah mulai baik. Menarik mencermati pendapat salah seorang responden (Y) :

“Bagi kami yang paling penting adalah pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Jangan hanya obral janji, tidak ada bukti nyatanya. Pelayanan juga harus optimal. Pada waktu pilkada kemarin, kami tidak didata dan juga tidak diberi kartu pemilih. Banyak WNI keturunan dekat sini tidak bisa menggunakan hak pilihnya.”

Dari keseluruhan harapan-harapan yang terjaring terlihat adanya perasaan teralienasi dalam kehidupan politik, baik dalam hal orientasi, sikap, maupun harapan yang mereka inginkan. *Triple discrimination* yang dialami perempuan etnis Cina (Tionghoa) diharapkan segera hilang dengan berubahnya format politik. Setidaknya kita berharap orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru akan lebih baik. Namun kenyataannya perubahan format politik tidak otomatis membangkitkan motivasi mereka untuk memahami politik apalagi terjun ke dalam kehidupan politik praktis, sebagaimana yang diungkapkan oleh LE, salah seorang Pengurus Wanita Himpunan Bersatu teguh (WHBT) untuk wilayah Sumbar-Riau :

“Kalau dilihat secara umum, perempuan etnis Cina (Tionghoa) tidak tertarik dengan politik. Selain tidak punya minat, waktu juga tidak ada karena mereka disibukkan dengan urusan rumah tangga, karir, dan pekerjaan (dagang). Kamipun di WHBT ini hanya bergerak di bidang sosial, terutama membantu anggota dalam memajukan kebudayaan serta urusan-urusan keagamaan. Sementara di bidang politik secara khusus tidak terprogram.”

Jika ditelaah lebih lanjut upaya pencerahan hak-hak keturunan etnis Cina (Tionghoa) telah dilakukan sejak dikeluarkannya Keppres No.6 tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi presiden yang mencabut Inpres No.14 tahun 1967 tentang pelarangan untuk merayakan upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Cina (Tionghoa) secara terbuka. Dua tahun berikutnya Megawati selaku presiden saat itu mengeluarkan Keppres No.191 tahun 2002 yang menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hal yang lebih menggembirakan lagi bagi etnis Cina (Tionghoa) adalah dikeluarkannya kebijakan yang menyatakan mengakhiri diskriminasi etnis sejak 11 Juli 2006.

Momentum-momentum tersebut selayaknya dapat menjadi *entry point* bagi etnis Cina (Tionghoa) pada umumnya dan perempuan etnis Cina (Tionghoa) pada khususnya untuk berkiprah di berbagai bidang khususnya bidang politik yang selama ini telah teralienasi dari kehidupan mereka. Perasaan teralienasi atau terdiskriminasi menurut Theodorson & Theodorson (1979) adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi mencakup perilaku apa saja yang berdasarkan perbedaan dibuat secara alamiah dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (merit).

Diskriminasi yang telah lama dilakukan membuat sebagian besar perempuan etnis Cina (Tionghoa) sebetulnya tidak begitu peduli dengan keadaan politik, mereka dapat dikatakan tidak memihak atau berkiblat ke politik manapun. Mereka lebih cenderung untuk memilih hidup tenteram lahir bathin dengan menjauhkan diri dari hiruk pikuk politik. Untuk itu, agar perempuan etnis Cina (Tionghoa) dapat

berkontribusi dalam bidang politik, pemerintah harus mengeluarkan suatu program khusus yang berfungsi sebagai *special threatment* agar mereka dapat diberdayakan.

BAB V KESEIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari paparan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) ditinjau dari orientasi kognitif masih superfisial atau masih jauh dari yang diharapkan. Hanya dalam tiga tema berikut, yaitu tentang kekuasaan kepresidenan, sistem peradilan, dan pemahaman terhadap pemilu yang dapat dijawab dengan baik. Sedangkan hal-hal mendasar tentang pengetahuan politik kenegaraan dapat dikatakan kurang dipahami.
2. Rendahnya orientasi kognitif perempuan etnis Cina (Tionghoa) ternyata paralel dengan performa sikap yang ditampilkannya. Dari lima tipe sikap yang ditanyakan, hanya tipe sikap *sense of political trust* yang ditanggapi positif. Sementara empat tipe sikap yang lain : (1) *sense of political involvement* ; (2) *sense of political efficacy* ; (3) *sense of civic awareness* ; dan (4) *sense of community political knowledge* berada dalam kategori negatif (kurang baik).
3. Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) dari dimensi evaluatif ternyata juga rendah, yang ditandai oleh jawaban-jawaban yang kurang tepat ataupun tidak tahu sama sekali.
4. Harapan perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru adalah kiranya pemerintah dapat melakukan pencerahan/ pemberdayaan politik secara terprogram agar mereka tidak lagi mengalami *triple discrimination*.

B. Saran.

Berdasarkan temuan penelitian, maka beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah hendaknya membuat program khusus (*special threatment*) bagi perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta keterampilan politik yang mereka miliki.
2. Pusat studi wanita serta berbagai institusi lainnya yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan perempuan seperti Kantor Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten hendaknya melakukan sosialisasi tentang hak-hak politik perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Irawan. (1997). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Almond, Gabriel dan G.B. Powell Jr. (1978). *Comparative Politics : A Development Approach*. New Delhi : Oxford and IBH Publishing Co.
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. (1990). *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora. Jakarta : Bina Aksara.
- Almond, Gabriel. "Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik" dalam Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (ed.). (1993). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Forrester, Geoff dan R.J. May (ed.). (1998). *The Fall of Soeharto*. Australia : Crawford House Publishing.
- Freedman, Amy L. (2000). *Political Participation and Ethnic Minorities : Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and United States*. London : Routledge.
- Gaffar, Afan. (1992). *The Javanese Voters : A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ihromi, T.O. (Penyunting). (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- J. Vredenberg. (1979). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Kusuma, Indradi. (2002). *Diskriminasi dalam Praktek*. Jakarta : DPP-FKKBI.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews (ed.). (1989). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mosse, Julia Cleves. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa Women's Crises Centre.
- Murniati, A. Nunuk Prasetyo. (1998). *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Patton, Michael. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park California : Sage Publication.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Stepan, Alfred, (1978). *The State and Society Peru in Comparative Perspective*. Princenton University Press.
- Theodorson, George A. & Achilles G. Theodorson. (1979) *A Modern Dictionary of Sociology*. New York : Hagerstown, San Francisco, London :Barnes & Noble Books
- Uhlen, Anders. (1997). *Indonesia and The Third Wave of Democratization : The Indonesian Pro Democracy Movement in a Changing World*. London : Curzon Press.
- (1997). *Oposisi Berserak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Rofik Suhud. Bandung : Mizan.

B. Laporan Penelitian, Makalah, Jurnal dan Koran, dan lain-lain

- BPS Kota Padang (2005). *Padang dalam Angka*.
- Gaffar, Afan. (1996). *Sebuah Catatan Untuk Wanita Indonesia*. Makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis UGM di Yogyakarta, 12 Desember 1996.
- Hendrik, Doni. (2003). *Perilaku Memilih Etnis Cina dalam Pemilu 1999 di Kota Padang*. Skripsi-FISIP Universitas Andalas.
- Moser, Caroline. (1989). "Gender Planing in Third World : Meeting Practical and Strategic Gender Needs" dalam *World Development Volume 17 Number 11*.
- Muller, Edward N. 1977 "Behavioral Correlate of Political Support, American Political Science Review Vol.LXXI dalam Ratnawati. (1993). *Sikap Perilaku dan Sistem Politik*. Laporan Penelitian UGM Yogyakarta.
- Ratnawati. (1993). *Sikap Perilaku dan Sistem Politik*. Laporan Penelitian UGM Yogyakarta
- Saputra, Dianthus. (2001). "Marginalisasi Perempuan Cina (Tionghoa) di Indonesia" dalam *Jurnal Perempuan No.17*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Suyanto, Isbodroini. (2003). *Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittinggi, 16 Oktober 2003.

LAMPIRAN I

CURRICULUM VITAE

PENELITI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Suryanef, M.Si.
2. NIP : 131945223.
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Payakumbuh, 06 Juni 1964.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Pangkat, Golongan : Pembina Tingkat I, IV b.
6. Jabatan : Pembantu Dekan III/Dosen Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang.
Nomor Telepon/Fax : 0751-7055671, 445187 ; Fax 0751-7055671
Alamat E-mail : nefaldy@yahoo.com.
8. Alamat Rumah : Perumahan Pondok Pinang Blok C-16 Lubuk Buaya Padang.
Nomor Telepon/HP : 0751-482731/08126628171.
9. Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri No.7 Payakumbuh, Tamat tahun 1976.
b. SMP Negeri No.1 Payakumbuh, Tamat tahun 1980.
c. SMA Negeri No.1 Payakumbuh, Tamat tahun 1983.
d. Strata 1 (S1) Jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang, Tamat tahun 1990.
e. Strata 2 (S2) Prodi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tamat tahun 2000.

10. Riwayat Pekerjaan

- a. Pembantu Dekan II FIS Universitas Negeri Padang, Periode 2007 – 2011
- b. Pembantu Dekan III FIS Universitas Negeri Padang, Periode 2003 – 2007.
- c. Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, Tahun 2003.
- d. Dosen FPIPS IKIP Padang (sekarang FIS-UNP) sejak tahun 1991.
- e. Sekretaris PC Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Padang Periode 2003-2008.
- f. Sekretaris Senat FIS UNP Periode 2005-2007, 2007-2011.
- g. Anggota Tim Pengembangan Kurikulum Inti Nasional Pendidikan Kewarganegaraan (2005).
- h. Anggota Tim SP4 Jurusan Ilmu Sosial Politik (2005 – 2006).
- i. Sekretaris Laboratorium PKN, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Periode 1998 – 2000, dan 1994 – 1996.
- j. Redaktur Pelaksana Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP dan Jurnal Demokrasi PK- CIVIC FIS-UNP.

11. Penelitian yang pernah dilakukan (5 tahun terakhir) :

- a. Profil Perempuan Sumatera Barat, Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, (Anggota, 2003). Penelitian Kerjasama dengan Balitbangda Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pelaksanaan Kampanye Pemilu 1999 dan Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Padang, (Ketua, 2003).
- c. Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) 2-4, Kerjasama dengan The Asia Foundation (Anggota, 2003-2004). Penelitian Kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia (Lokus Kecamatan Tilatang Kamang Agam), Penelitian kerjasama dengan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta (Peneliti Lokal, 2003-2004).
- e. Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Politik, (Anggota, 2003). Penelitian Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- f. Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah di Kota Padang, (Ketua, 2004). Penelitian Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- g. Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih, (Ketua, 2004).
- h. Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, (Anggota, 2005). Penelitian Kerjasama dengan Balitbangda Provinsi Sumatera Barat.
- i. Hubungan Kerjasama Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Sumatera Barat, (Anggota, 2005). Penelitian Kerjasama dengan Balitbangda Provinsi Sumatera Barat.
- j. Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kota Padang, (Anggota, 2005).
- k. Profil, Sikap, dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Pasca 30% Kuota Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat (Anggota, 2006).
- l. Persepsi Politik dan Perilaku Pemberian Suara Mahasiswa FIS Universitas Negeri Padang dalam Pemilu Legislatif (2006).
- m. Menumbuhkembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa Melalui Metode Socrates dalam Pembelajaran Ilmu Politik Pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, (Ketua, 2006).
- n. Orientasi Politik dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Kota Padang (Anggota, 2007).
- o. Perilaku Pemberian Suara, Akses dan Kontrol Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang, (Anggota, 2007).

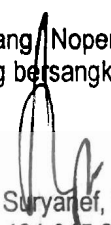
- p. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan di Nagari-nagari Sumatera Barat (Ketua, 2007). Penelitian Kerjasama dengan Balitbang Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- q. Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagai Basis Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, Ketua, 2008). Dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat nDirjen Dikti, Depdiknas Jakarta.
- r. Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Kota Padang Terhadap Kebijakan Pasca Orde Baru (Anggota, 2008). Dibiayai Dana DIPA Universitas Negeri Padang.

12. Publikasi Ilmiah Lainnya :

- a. Marjinalisasi Tenaga Kerja Wanita dalam Sistem Ekonomi Pasar, 2003 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Humanus, UNP).
- b. Perilaku Pemberian Suara Ditinjau dari Struktur Sosial Pemilih, 2003. (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Analisa Politik FISIP UNAND).
- c. Kampanye Pemilu 2004 : Sebuah Pencerahan Pendidikan Politik, Makalah disampaikan dalam forum Seminar Nasional tentang Pemilihan Umum, Fakultas Hukum UNAND, Padang, 9 Februari 2003).
- d. Potensi Konflik Sosial Berbasis Agama di Minangkabau, 2003. (Artikel dalam Buletin Flamma, diterbitkan Intstitute for Research and Empowerment, Yogyakarta, 2003).
- e. Demokrasi Adat di Minangkabau, Makalah disampaikan dalam forum Seminar Nasional tentang Demokrasi Adat, HAM dan Pluralisme, Intstitute for Research and Empowerment, Yogyakarta, 20-22 April 2004).
- f. Isu dan Juru Kampanye Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih, 2004. (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Analisa Politik FISIP UNAND).
- g. Kembali ke Nagari : Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal (dalam Buku Globalisasi, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal, diterbitkan LP3ES, 2004).
- h. Reformulasi Peran Ninik Mamak dalam Nagari "Baru" (Artikel dalam Buletin Flamma, diterbitkan Intstitute for Research and Empowerment, Yogyakarta, 2004).
- i. Menyoal Demokrasi Lokal Pasca UU No.32 Tahun 2004, Makalah disampaikan dalam forum Seminar Internasional Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan Kerjasama Universitas Negeri Padang dengan Indiana University USA, 15 Maret 2005).
- j. Teori Wacana dalam Ilmu Politik, Makalah disampaikan dalam Forum Seminar Ilmiah Jurusan Ilmu Sosial Politik, Padang, Juli 2005.

- k. Pemberdayaan Politik Menuju Politik Transformatif, Makalah disampaikan dalam forum Seminar Ilmiah tentang Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Padang, 28 Desember 2005).
 - l. Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan dalam Pemilu 1999, (Penulis Pendamping, Artikel Ilmiah dalam Jurnal Demokrasi Vol.IV No.1, April 2005).
 - m. Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang, (Penulis Pendamping, Artikel Ilmiah dalam Jurnal Demokrasi Vol.IV No.1, April 2005).
 - n. Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat (Artikel dalam Jurnal Balitbang Provinsi Sumatera Barat, 2006).
13. Pelatihan yang pernah diikuti :
- a. Penilaian Hasil Belajar.
 - b. Model-model Pembelajaran Inovatif.
 - c. Penelitian Tindakan Kelas.
 - d. Penulisan Artikel Ilmiah.
 - e. Penyusunan Proposal Hibah Kompetisi Berbasis Institusi.
 - f. Orientasi Pengembangan Pendamping Kemahasiswaan.
 - g. Pelatihan Pelatih Latihan Keterampilan Manajemen Kemahasiswaan.
 - h. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
14. Mata kuliah yang diampu dalam dua tahun terakhir :
- a. Sistem Politik Indonesia.
 - b. Demokrasi.
 - c. Metode Penelitian Kuantitatif.
 - d. Metode Penelitian Sosial.
 - e. Komunikasi dan Public Relation.
 - f. Statistika Sosial.
 - g. Kebijakan Publik.
 - h. Evaluasi Pendidikan.

Padang, Nopember 2008
Yang bersangkutan,


Drs. Suryanef, M.Si.
NIP. 131 945 223

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Ai Rafni, M.Si.
2. NIP : 132056198.
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Padang, 12 Februari 1968.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Pangkat, Golongan : Pembina, IV a.
6. Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu-ilmu Sosial UNP Padang.
7. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang.
Nomor Telepon/Fax : 0751-7055671, 445187 ; Fax 0751-7055671
Alamat E-mail : nefaldy@yahoo.com.
8. Alamat Rumah : Perumahan Pondok Pinang Blok C-16 Lubuk Buaya Padang.
Nomor Telepon/HP : 0751-482731/08126628171.
9. Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri No.7 Padang, Tamat tahun 1981.
b. SMP Negeri No.37 Jakarta Selatan, Tamat tahun 1984.
c. SMA Negeri No.34 Jakarta Selatan, Tamat tahun 1987.
d. Strata 1 (S1) Jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang,
Tamat tahun 1992.
e. Strata 2 (S2) Prodi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, Tamat tahun 1999.
10. Penelitian yang dilakukan (5 tahun terakhir) :
 - a. Pelaksanaan Kampanye Pemilu 1999 dan Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Padang, (Anggota, 2003).
 - b. Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Politik, (Ketua, 2003).
 - c. Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih, (Anggota, 2004).
 - d. Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat , (Ketua, 2005).
 - e. Hubungan Kerjasama Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Sumatera Barat, (Anggota, 2005).
 - f. Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kota Padang, (Ketua, 2005).
 - g. Profil, Sikap, dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Pasca 30% Kuota Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat (Ketua, 2006).
 - h. Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang, (Anggota, 2006).

- i. Menumbuhkembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa Melalui Metode Socrates dalam Pembelajaran Ilmu Politik Pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, (Anggota, 2006).
- j. Perilaku Pemberian Suara, Akses dan Kontrol Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang, (Ketua, 2007).
- k. Persepsi dan Kontrol Politik Masyarakat Kota Padang Terhadap Pelaksanaan Pilkada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, (Anggota, 2007).
- l. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan di Nagari-nagari Sumatera Barat, (Anggota, 2007).
- m. Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagai Basis Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, (Anggota, 2008). Dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat nDirjen Dikti, Depdiknas Jakarta.
- n. Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Kota Padang Terhadap Kebijakan Pasca Orde Baru (Ketua, 2008). Dibiayai Dana DIPA Universitas Negeri Padang.

11. Karya Ilmiah Lainnya :

- a. Reformasi Politik dan Implikasinya Terhadap Pengajaran PPKN, (Penulis Pendamping, 2000, Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKSBE FIS UNP).
- b. Menggusur Sang Prabu dalam Rezim Neopatrimonial, (Penulis Utama, 2000, Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkap PKSBE- FIS UNP).
- c. Pengetahuan dan Sikap Perempuan Terhadap Kebijakan Orde Baru, (Penulis Utama, 2001, Artikel Ilmiah dalam Jurnal Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia).
- d. Pendekatan Ekonomi Politik : Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Politik, (Penulis Pendamping, 2001, Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKSBE FIS UNP).
- e. Mencari Format Ekonomi Kerakyatan, (Penulis Utama, 2001, Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkap PKSBE- FIS UNP).
- f. Kekuasaan dan Kepemimpinan Nagari Pasca UU No.5/1979 (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, "Demokrasi Masyarakat Adat", Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta, 20-21 Oktober 2002).
- g. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pasca Reformasi Politik, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kerjasama UNP dengan Indiana University, 23 Mei 2003).
- o. Perilaku Pemberian Suara Ditinjau dari Struktur Sosial Pemilih, (Penulis Pendamping, 2003, Artikel Ilmiah dalam Jurnal Analisa Politik FISIP UNAND).

- p. Isu dan Juru Kampanye Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih, (Penulis Utama, 2004, Artikel Ilmiah dalam Jurnal Analisa Politik FISIP UNAND).
- q. Kembali ke Nagari : Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal (Penulis Pendamping, dalam Buku Globalisasi, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal, diterbitkan LP3ES, 2004).
- r. *Affirmative Action* : Langkah Konkrit Menuju Partisipasi Politik Perempuan (Makalah disampaikan dalam Forum Seminar Internasional, "Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan, Kerjasama UNP dengan Indiana University USA, 15 Maret 2005).
- s. Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan dalam Pemilu 1999, (Penulis Utama, Artikel Ilmiah dalam Jurnal Demokrasi Vol.IV No.1, April 2005).
- t. Profil Kemampuan Manajemen Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan, Informasi-Komunikasi Penyelenggara Pemerintahan Nagari Serta Kendala yang Dihadapi, (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Baliwang Provinsi Sumatera Barat, 2006).

12. Pelatihan yang pernah diikuti :

- a. Penilaian Hasil Belajar.
- b. Model-model Pembelajaran Inovatif.
- c. Penelitian Tindakan Kelas.
- d. Penulisan Artikel Ilmiah.
- e. Penyusunan Proposal Hibah Kompetisi Berbasis Institusi.
- f. Orientasi Pengembangan Pendamping Mahasiswa.
- g. Pelatihan Pelatih Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa.
- h. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

14. Mata kuliah yang diampu dalam dua tahun terakhir :

- a. Sistem Politik Indonesia.
- b. Demokrasi.
- c. Administrasi Perpajakan.
- d. Perspektif Gender.
- e. Pengantar Ilmu Pemerintahan.
- f. Ilmu Politik.

Padang, Nopember 2008
Yang bersangkutan,



Dra. Al Rafni, M.Si.
NIP. 132 056 198